

ABSTRAK

ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN *DESTRUCTIVE FISHING* (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

Oleh

Naomi Maynarti Hutagalung

Destructive fishing atau kegiatan menangkap ikan dengan alat atau bahan yang dapat merusak ekosistem laut merupakan problematika yang masih lazim terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, perlu langkah serius dan maksimal dari Direktorat Kepolisian Air (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk melakukan penanggulangan terhadap *destructive fishing*. Berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan *destructive fishing*, skripsi ini akan membahas beberapa masalah yaitu bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan *destructive fishing* dan apakah faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan *destructive fishing* di Provinsi Lampung.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan jurnal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif dan analisis penafsiran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dinyatakan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan *destructive fishing* dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan. Upaya non penal yaitu melalui kegiatan Jumat Curhat, patroli, dan sosialisasi atau penyuluhan. Faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan *destructive fishing* yaitu adanya kelemahan dari masing-masing undang-undang yang ada, maka dari itu polisi lebih dominan menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk pelaku *destructive fishing* dengan bahan peledak yang berakibat pada kinerja aparat kepolisian yang menjadi tidak maksimal, tidak memadainya sarana dan prasarana seperti kurangnya kapal patroli dan tidak adanya laboratorium forensik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih marak melakukan *destructive fishing*,

Naomi Maynarti Hutagalung

serta menjadikan kegiatan *destructive fishing* suatu kebiasaan buruk di dalam masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung seharusnya mengadakan operasi khusus di daerah-daerah rawan kejahatan *destructive fishing* agar daerah rawan kejahatan *destructive fishing* tidak semakin bertambah banyak dan dapat membuat daerah yang tadinya dikenal sebagai daerah rawan *destructive fishing* berubah statusnya menjadi daerah yang tidak rawan lagi. Ditpolair seharusnya juga dapat bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Universitas, atau lembaga lain yang memiliki laboratorium agar proses penyidikan terhadap *destructive fishing* yang menggunakan bahan peledak dapat lebih cepat dan efisien.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, *Destructive Fishing*

ABSTRACT

ANALYSIS OF POLICE EFFORTS IN COUNTERMEASURES CRIME OF DESTRUCTIVE FISHING (Study at the Directorate of Water Police Lampung Regional Police)

By

Naomi Maynarti Hutagalung

Destructive fishing or fishing activities with tools or materials that can damage the marine ecosystem is a problem that is still prevalent in the Lampung Province area. Therefore, it is necessary to take serious and maximum steps from the Directorate of Water Police (Ditpolair) of the Lampung Regional Police (Polda) to counter destructive fishing. In relation to the efforts of the police in overcoming the crime of destructive fishing, this thesis will discuss several issues, namely how the police efforts are in overcoming the crime of destructive fishing and whether the factors that hinder the police in overcoming the crime of destructive fishing in Lampung Province.

The research method in this thesis uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data is data sourced from interviews with sources and secondary data sourced from books, research results, and journals. Data analysis was carried out using interactive analysis and legal interpretation analysis.

Based on the results of research and discussion, it is stated that police efforts in overcoming destructive fishing crimes are carried out through penal efforts and non-penal efforts. Penal efforts are through investigation, investigation, and confiscation. Non-penal efforts are through Friday Vent activities, patrols, and socialization or counseling. The factors that hinder the police in tackling the crime of destructive fishing are the weaknesses of each existing law, therefore the police are more dominant in using Emergency Law Number 12 of 1951 for perpetrators of destructive fishing with explosives which results in the performance of the police apparatus which is not optimal, inadequate facilities and infrastructure such as the lack of patrol boats and the absence of forensic laboratories, low legal awareness of the community who are still rampant in destructive fishing, and making destructive fishing activities a bad habit in the community, especially the fishing community.

Naomi Maynarti Hutagalung

The suggestion that the author can convey is that the Directorate of Marine Police (Ditpolair) of the Lampung Regional Police (Polda) should hold special operations in areas prone to destructive fishing crime so that areas prone to destructive fishing crime do not increase and can make areas that were previously known as areas prone to destructive fishing changed its status to an area that is no longer vulnerable. The Directorate of Police should also be able to collaborate with other agencies such as the Marine and Fisheries Service, universities, or other institutions that have laboratories so that the investigation process for destructive fishing using explosives can be faster and more efficient.

Keywords: Police Efforts, Crime Countermeasures, Destructive Fishing